



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen

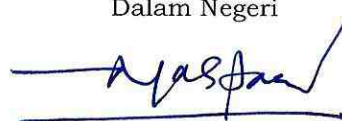
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri	Rp.963.748.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri	Rp.95.752.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri	Rp.40.500.000,-
Total Anggaran	Rp.1.100.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan



Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Politik
Dalam Negeri



Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

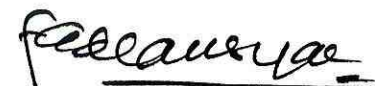
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

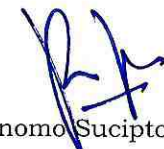
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

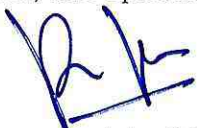
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi, dan aparatur negara yang disetujui Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi, dan aparatur negara yang disetujui Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi, dan aparatur negara yang disetujui Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)
		Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.517.616.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.43.036.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, HAM, dan aparatur negara	Rp.10.290.000,-
4. Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputan Bidang Polhukam	Rp.422.058.000,-
Total Anggaran	Rp.993.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.


Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	Rp.609.170.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	Rp.103.627.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	Rp.380.203.000,-
Total Anggaran	Rp.1.093.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan



Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional



Johar Arifin, S.IP., M.P.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.877.904.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.43.432.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Inf	Rp.18.664.000,-
Total Anggaran	Rp.940.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan



Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika



Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Irawati, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

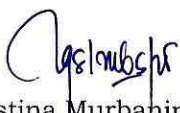
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian


Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha


Diana Irawati, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha yang disetujui Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi, Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.843.325.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.108.849.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan	Rp.37.826.000,-
Total Anggaran	Rp.990.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian


Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, **30** Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha


Diana Irawati, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, **30** Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian,

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perniagaan,
Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan,


Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.


Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang PERNIAGAAN, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)
		Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.764.568.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.32.848.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagaker	Rp.15.584.000,-
4. Pengoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp.357.000.000,-
Total Anggaran	Rp.1.170.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian,


Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, ~~30~~ 31 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perniagaan,
Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan,

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah,
dan Industri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Perekonomian,

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah,
dan Industri,

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH,
DAN INDUSTRI

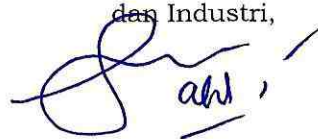
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.821.232.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.66.966.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wil	Rp.101.802.000,-
Total Anggaran	Rp.990.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian,


Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah,
dan Industri,


Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian,

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,
Pertanian, Lingkungan Hidup, dan
Kehutanan,

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN
KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan yang disetujui Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.911.286.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.52.554.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hi	Rp.26.160.000,-
Total Anggaran	Rp.990.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian,


Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan,
Pertanian, Lingkungan Hidup, dan
Kehutanan,


Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga

Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp.733.409.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp.204.661.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp.51.930.000,-
Total Anggaran	Rp.990.000.000,-

Pihak Kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.	Jakarta, 30 Januari 2018 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga  Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.
---	--



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,

Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Pihak Pertama,

Asisten Deputy Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

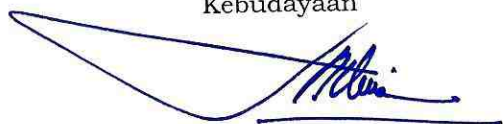
Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)
		Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.705.719.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.25.650.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.2.700.000,-
4. Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.145.931.000,-
Total Anggaran	Rp.880.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, **30** Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

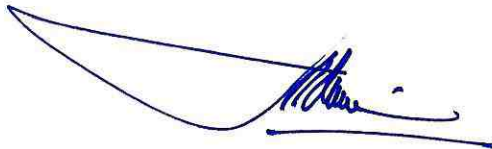
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.319.228.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan P	Rp.152.435.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan So	Rp.403.337.000,-
Total Anggaran	Rp.875.000.000,-

Jakarta, ~~30~~ 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak



Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.



Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

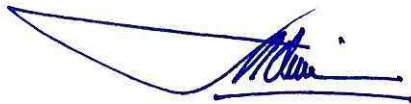
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.335.546.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.117.282.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan T	Rp.427.172.000,-
Total Anggaran	Rp.880.000.000,-

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.



Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Kelautan dan Perikanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ 31 Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Kelautan dan
Perikanan

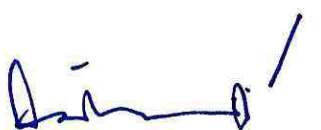
Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.834.572.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.71.589.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.43.839.000,-
Total Anggaran	Rp.950.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan



Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Hamidi, S.H., M.A.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, **30** Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral

Mohammad Hamidi, S.H., M.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman	Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen
		Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	B (79)

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.940.634.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.39.550.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.58.904.000,-
4. Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman	Rp.142.912.000,-
Total Anggaran	Rp.1.182.000.000,-

Jakarta, **30** Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.



Mohamad Hamidi, S.H., M.A.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafruddin, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Perhubungan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Perhubungan

Syafruddin, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perhubungan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan	Rp.677.425.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan	Rp.76.210.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perhubungan	Rp.196.365.000,-
Total Anggaran	Rp.950.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan



Syafruddin, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Kepariwisata,
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan
Maritim

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG KEPARIWISATAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN
LINGKUNGAN MARITIM

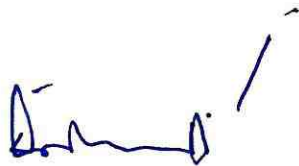
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.765.108.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.100.196.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan L	Rp.84.696.000,-
Total Anggaran	Rp.950.000.000,-

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata,
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan
Maritim



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.



Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan
Persidangan

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-Bahan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	
1. Perencanaan sidang kabinet	Rp.458.332.000,-
2. Penyiapan perlengkapan sidang kabinet	Rp.3.241.214.000,-
3. Penyiapan bahan sidang kabinet	Rp.300.454.000,-
Total Anggaran	Rp.4.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan



Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Priyantono, S.H.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Pelaporan
Persidangan

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Heru Priyantono, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Dokumen Hasil Sidang Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretaris Kabinet terhadap dokumen hasil-hasil sidang kabinet	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan salinan risalah sidang kabinet	100 Persen
		Persentase Arahan Presiden (APRES) pada sidang kabinet dan rapat terbatas yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet	100 Persen
		Persentase transkripsi sidang kabinet yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (70)
		Persentase pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	
1. Perekaman dan penyusunan transkripsi sidang kabinet	Rp.611.261.000,-
2. Penyusunan rancangan risalah sidang kabinet dan Arahan Presiden serta pendistribusian Risalah Sidang Kabinet dan Arahan Presiden	Rp.775.908.000,-
3. Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp.612.831.000,-
Total Anggaran	Rp.2.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pelaporan
Persidangan



Heru Priyantono, S.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Harnowo, S.S., M.Si.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Naskah dan
Terjemahan

Eko Harnowo, S.S., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN TERJEMAHAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	100 Persen
2	Tersedianya Layanan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang Berkualitas	Persentase Pejabat Fungsional Penerjemah yang dibina sesuai rencana	100 Persen
		Persentase dokumen pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah yang disusun sesuai rencana	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan	
1. Penyiapan konsep naskah kepresidenan	Rp.471.879.000,-
2. Pelaksanaan penerjemahan tulis atas dokumen dalam rangka mendukung Presiden	Rp.132.168.000,-
3. Dukungan fasilitas penerjemah dan dokumentasi penerjemah	Rp.72.558.000,-
4. Penilaian dan penetapan angka kredit	Rp.39.062.000,-
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan penerjemah	Rp.1.735.430.000,-
6. Evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan	Rp.190.984.000,-
7. Sosialisasi Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp.357.919.000,-
Total Anggaran	Rp.3.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan


Eko Harnowo, S.S., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Furkon Setiawan, S.H., S.Sos., M.Si.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Al Furkon Setiawan, S.H., S.Sos., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan	100 Persen

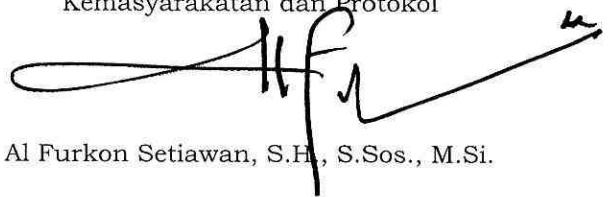
Kegiatan	Anggaran
Dukungan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi & Penyiapan Keprotokolan Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Setkab serta Koordinasi Pelaksanaan Keprotokolan Rapat dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden	
1. Penyusunan strategi hubungan kemasyarakatan, peliputan dan pengolahan informasi, serta pemantauan media	Rp.1.448.143.000,-
2. Penyebarluasan dan pelayanan informasi, pengelolaan media, serta penyelenggaraan koordinasi hubungan kemasyarakatan	Rp.429.100.000,-
3. Pelaksanaan keprotokolan	Rp.1.122.757.000,-
Total Anggaran	Rp.3.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol



Al Furkon Setiawan, S.H., S.Sos., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Islachuddin, M.Si.

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, **30** Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Farid Utomo, S.H., M.H.

Drs. Islachuddin, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

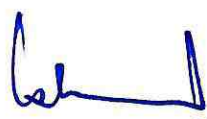
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 Persen
		Jumlah temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang material	0
3	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	85 persen
		Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Pengoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran	Rp.585.899.000,-
2. Pengoordinasian dan penelaahan dokumen perencanaan program dan anggaran	Rp.57.800.000,-
3. Pengoordinasian dan pembahasan dokumen perencanaan program dan anggaran	Rp.371.428.000,-
4. Pengoordinasian, penyiapan, dan penyusunan bahan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keuangan	Rp.51.252.000,-
5. Pengoordinasian, penyusunan, penelaahan, dan pembahasan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Rp.600.000,-
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bulanan atas penyerapan anggaran dan capaian output	Rp.229.055.000,-
7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pertemuan/rapat luar kantor	Rp.335.709.000,-
8. Mengoordinasikan penyusunan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Kabinet	Rp.225.349.000,-
9. Melaksanakan koordinasi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Rp.52.200.000,-
10. Melaksanakan penelaahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Rp.3.600.000,-
11. Melaksanakan pembahasan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Rp.55.500.000,-
12. Melaksanakan penyusunan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	Rp.304.097.000,-
13. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Administrasi	Rp.148.834.000,-
14. Penyelenggaraan pelayanan dukungan teknis pelaksanaan anggaran	Rp.405.910.000,-
15. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan	Rp.366.418.000,-
Total Anggaran	Rp.3.193.651.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi


Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan


Drs. Islachuddin, M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Farid Utomo, S.H., M.H.

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	70 Persen
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80 Persen
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80 Persen
2	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80 Persen
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	
1. Gaji dan Tunjangan	Rp.105.765.496.000,-
2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian/pensiun pegawai	Rp.515.533.000,-
3. Dukungan teknis dan administrasi pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi madya dan/atau jabatan pimpinan tinggi utama	Rp.1.180.702.000,-
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural	Rp.1.171.625.000,-
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis	Rp.5.203.709.000,-
6. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Fungsional	Rp.65.821.000,-
7. Pemberian beasiswa	Rp.646.360.000,-
8. Penyelesaian rancangan peraturan dan keputusan internal	Rp.82.600.000,-
Total Anggaran	Rp.114.631.846.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana



Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Jumlah unit kedeputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "BB"	5 Unit Kerja
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	90 Persen
		Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	5 Komponen
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	85 Persen
2	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Layanan Persuratan serta Ketatausahaan Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	80 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu, Reformasi Birokrasi, serta Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan	
1. Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp.241.185.000,-
2. Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu	Rp.36.200.000,-
3. Pengembangan sistem manajemen kinerja	Rp.304.087.000,-
4. Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp.384.586.000,-
5. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp.22.000.000,-
6. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp.315.970.000,-
7. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat	Rp.400.000.000,-
8. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang komunikasi	Rp.400.000.000,-
9. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang reformasi birokrasi	Rp.400.000.000,-
10. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang hukum dan hubungan internasional	Rp.400.000.000,-
11. Perumusan dan penyampaian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet	Rp.800.000.000,-
12. Dukungan pelayanan kunjungan kerja dan rapat/pertemuan pimpinan (Seskab, Waseskab, Depmin	Rp.2.458.839.000,-
13. Dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan persuratan	Rp.535.052.000,-
Total Anggaran	Rp.6.697.919.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018
Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi



Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.

Catatan:

Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di dalamnya termasuk anggaran Staf Ahli Sekretariat Kabinet, Staf Khusus Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Administrasi dengan total sebesar Rp. 4.858.839.000,-.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Temon, M.Si.

Jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, ~~30~~ 31 Januari 2018

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum

Drs. Temon, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BIRO UMUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengadaan, Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan	95 Persen
		Persentase akurasi laporan Barang Milik Negara (BMN)	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Pengadaan, Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.37.325.473.000,-
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp.1.375.000.000,-
3. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Rp.1.134.338.000,-
4. Pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan	Rp.200.000.000,-
5. Perencanaan, penghapusan, penatausahaan, dan penyusunan laporan barang milik negara	Rp.449.464.000,-
6. Penetapan status, monitoring dan pengawasan serta pendistribusian barang milik negara	Rp.221.672.000,-
7. Perencanaan pengadaan, pemeliharaan, serta perlengkapan dan jamuan	Rp.294.430.000,-
8. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, serta perlengkapan dan jamuan	Rp.6.161.622.000,-
9. Monitoring dan evaluasi pengadaan, pemeliharaan, serta perlengkapan dan jamuan	Rp.6.000.000,-
Total Anggaran	Rp.47.167.999.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum



Drs. Temon, M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wawan Gunawan, Ak., M.M.

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Inspektur

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Wawan Gunawan, Ak., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92 Persen
		Jumlah unit ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit
		Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	30 April 2018
		Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Penyusunan kebijakan pengawasan internal	Rp.21.000.000,-
2. Pelaksanaan audit internal	Rp.559.087.000,-
3. Tindak lanjut hasil laporan hasil pemeriksaan	Rp.47.700.000,-
4. Reviu perencanaan anggaran	Rp.36.700.000,-
5. Reviu laporan keuangan	Rp.36.700.000,-
6. Reviu laporan kinerja	Rp.38.900.000,-
7. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Rp.94.250.000,-
8. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp.85.200.000,-
9. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Rp.260.913.000,-
10. Pelaksanaan administrasi Inspektorat	Rp.19.550.000,-
Total Anggaran	Rp.1.200.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Pertama,
Inspektur

Wawan Gunawan, Ak., M.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwanto, S.Kom.

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

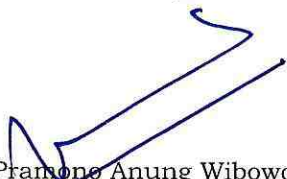
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

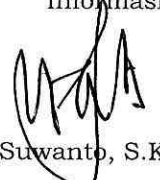
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.


Suwanto, S.Kom.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Dukungan Sistem dan Teknologi Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan, serta Layanan Data dan Informasi yang Berkualitas	Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan	80 Persen
		Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	70 Persen
		Jumlah pengunduh data dan informasi pada website Sekretariat Kabinet	390.000 Pengunduh
		Persentase kepuasan pengakses terhadap layanan website Sekretariat Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan	
1. Pembangunan/ pengembangan infrastruktur dan jaringan	Rp.5.427.800.000,-
2. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur dan jaringan	Rp.1.672.501.000,-
3. Pembangunan/ pengembangan dan penerapan teknologi dan sistem informasi	Rp.725.672.000,-
4. Pengumpulan dan pengelolaan data	Rp.226.245.000,-
5. Pengelolaan arsip dan dokumentasi	Rp.209.592.000,-
6. Pengelolaan perpustakaan	Rp.129.890.000,-
Total Anggaran	Rp.8.391.700.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Prambono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 30 Januari 2018
Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi

Suwanto, S.Kom.